

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Angger Sigit, M. C, 2016,"*Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*", Yogyakarta, Pustaka Yustia.

Burhan, A., 2013,"*Metode penelitian Hukum*", Jakarta, Rineka Cipta.

Ishaq, 2017,"*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*", Bandung, Alfabeta.

Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*",Mataram, Mataram Universty Press.

Rita Hanafie, 2010,"*Pengantar Ekonomi Pertanian*", CV Andi, Yogyakarta.

Salim, E. S., 2013, "*Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H., 2013, "*Metode Penelitian Hukum dan Juimetri*", Jakarta, PT Ghalia Indonesia.

Suadi, A., 2014, "*Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*", Depok, PT. Raja Grafindo Persada.

Suprihanto, J.,2014, "*Manajemen*", Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Wibowo, C., 2018, "*Desentralisasi Otonomi Daerah dan Sosial Politik lokal di Indonesia*", Jakarta, Indocamp.

Zainuddin, A. 2014, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

Andina Elok Puri Maharani dan Fredyta Prehantoro, 2017, *“Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk Mencapai Good Government Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa”*, Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 2.

Febby dkk, 2020, *“Analisis Persepsi Wisatawan Terhadap Infrastruktur Wisata dan Kenyamanan Objek Wisata Air Terjun Kermon Yawosi Biak Utara”*, Jurnal Kajian dan Terapan Parawisata (JKTP), Vol. 8 No. 1 hlm 58.

Haryani, D. 2015, *“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sedang Bedagai”*, Jurnal Perspektif , Vol. 8 No. 1 hlm 427.

Laurensius, D., 2017, *“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Keuangan”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 3.

Mualifu, A. G. 2019, *“Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Komite Organisasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa”*, Jurnal Of Economic, Business and Engineering , Vol. 1 No. 1.

Mohamad Fasyehhudin dan Muhyi Mohas, 2020, *“The Urgency of Supervision in Improving the Performance of Village Apparatus in Village Government*

as The Embodiment of Good Governance”, JurnalDinamikaHukum, Vol. 20 Issue 1.

Neti Sunarti, 2018, *“Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa”*, Jurnal IlmiahIlmuAdministrasiNegara, Vol. 5, No. 2.

Palindri, R. G. 2020, *“Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa”*, Jurnal Akutansi dan Governance , Vol. 1 No. 1 hlm 59.

Prihasantyo, P. d. 2022, *“Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa”*, Jurnal Akutansi dan Pajak , Vol. 23 No. 1.

Prihastuti, D. 2022, *“Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi daerah dalam Proses Pemerintah Dikaitkan Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”*, Jurnal Legislasi , Vol. 19 No. 1 29 - 41.

Sunarti, N. 2018. *“Pengawasan sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa”*, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara , Vol. 5 No. 2 46 - 55.

Syarifuddin. 2020, *“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutainegara”*, Jurnal Ilmu Pemerintah , Vol. 8 No. 1.

T. Fahrul Gafar, et al, *Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.3, 2022, hlm 8.

Trieputra I., 2015, "*Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi Di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa)*", Jurnal Ilmu Politik, vol. 2, no. 6.

Yakub Murdani, 2017, "*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 4.

Yoga, R. d. 2017, "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*", Jurnal Prespektif , Vol. 6 No.2 41-52.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Des

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Internet

Humas, *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*, <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun2022/>, 19 Februari 2022

Data Indonesia.id, ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa Pada 2022,

<https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, 4 April 2023.

